

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam alam demokrasi saat ini peran informasi dalam masyarakat menjadi sangat penting. Informasi menjadi sarana kehidupan yang dalam jumlah besar bebas berlalu lalang ketiap rumah. Sekarang ini masyarakat menikmati kelimpahan informasi yang luar biasa. Hal ini terkait dengan makin banyak, dan beragamnya industri media informasi dan komunikasi, mulai cetak hingga elektronik yang menawarkan berita dan acara lainnya.

Dengan beragamnya industri media, masyarakat mudah memperoleh informasi tentang dunia dari media massa. Menurut McLuhan, sebagaimana dikutip Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi, media massa adalah perpanjangan alat indra manusia.¹ Dengan media massa manusia bisa memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak dialami secara langsung.

Media massa merupakan saluran pesan mempunyai fungsi memberikan informasi bagi masyarakat luas. Sebagai salah satu saluran pesan sudah seleyaknya media massa menjalankan fungsi untuk menginformasikan peristiwa-peristiwa secara proporsional. Media massa dapat berperan sebagai lembaga yang dapat membentuk opini dan persepsi. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat pada umumnya akan memaknai pesan sebagaimana adanya tanpa menganalisa isi berita secara mendetail. Media massa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perannya dalam kehidupan terasa semakin

¹Rakhmat, Jalaludin. 1993. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman: 220

penting. Dengan teknologi dan modal yang dimilikinya, media massa bukan hanya menjadi pelapor kejadian atau cermin realitas, melainkan juga sebagai pencipta realitas itu sendiri. Media menciptakan realitas versinya sendiri untuk kemudian disebarakan ke khalayak.²

Disaat media massa ramai memberitakan mengenai perpecahan partai Golkar. Sementara itu Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan sikap mengenai keterlibatan Menteri Hukum dan Ham Yasona laoly dalam kekisruhan di tubuh partai berlambang beringin tersebut, tidak pelak hal ini memancing amarah dari Koalisi Merah Putih terutama partai Golkar kubu Abu Rizal Bakrie.

Peran dan fungsi media massa sebagai wadah yang dapat melakukan proses mediasi antara kepentingan publik dan politik melalui pemberitaan sebagai salah satu sarana kontrol dan pilar terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan Demokratis.

Dalam suatu Negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga Negara haruslah sama-sama kuat dan saling mengendalikan dalam hubungan (*checks and balance*). Akan tetapi jika lembaga-lembaga Negara tersebut tidak berungsi dengan baik, kinerjanya tidak akan efektif dalam menjalankan fungsinya masing-masing maka tidak menutup kemungkinan partai-partai politik yang berkuasa dapat mengendalikan proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan sesuai dengan kepentingan partainya saja.

Oleh karena itu komunikasi antara pemerintah dan pimpinan lembaga-lembaga Negara sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Selain itu pemerintah juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat

² Selu Kushendrawati, Margaretha. 2011. *Etika Komunikasi politik*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Halaman: 30

agar apa yang menjadi kebijakan pemerintah mendapatkan „*feedback*“ dari masyarakat. Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya yang harus dibangun berkaitan dengan menumbuhkan rasionalisasi terhadap komunikasi dan upaya menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat sebagai landasan bahwa pemerintah berkomitmen bersama rakyat Indonesia.

Di Indonesia, masyarakat sendiri tidak mudah untuk memahami media secara menyeluruh. Oleh karenanya, masyarakat harus lebih berani kritis terhadap media dengan melakukan kontrol, sehingga fungsi ideal media sebagai media informasi kepada masyarakat tetap terpelihara.

Menurut Miriam melalui media massa masyarakat ramai diajak mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan menilainya menurut kemampuan masing-masing. Dengan demikian rakyat di didik ke arah kewarganegaraan yang sadar dan bertanggung jawab, dan partisipasi politiknya dapat dibina.³

Seiring dengan itu, tak bisa dipungkiri bahwa partai politik masih belum mampu memposisikan diri sebagai lembaga politik yang berperan menyalurkan aspirasi masyarakat, wadah dan media *political education*, sosialisasi politik, media rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik yang baik. Apalagi, menciptakan budaya politik demokratis yang bermuara pada masyarakat partisipatif. Hal ini terlihat dari penyajian pemberitaan di Televisi yang mengulas berita terkait perpecahan ditubuh Partai Golkar.

Partai politik sebagai salah satu lembaga politik, jika kemudian tidak mampu mencapai proses pelembagaan seperti halnya di atas, maka budaya

³Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman: 327

demokratis akan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kepentingan politik golongan saat ini sangat kental terlihat dan menjadi ciri utama dalam proses kebijakan pemerintah.

Walaupun Indonesia telah mendapatkan pujian internasional dan mendapat predikat negara demokrasi terbesar ketiga didunia setelah Amerika dan India, tetapi kita lupa bahwa kualitas lembaga-lembaga lain seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga independen lainnya yang dipilih oleh DPR tergantung dari kualitas partai politik. Jika proses seleksinya baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan mengalami peningkatan kualitas. Sebaliknya jika proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh partai politik tidak baik, maka kehidupan bangsa akan sarat dengan permasalahan.

Realitas partai politik saat ini tentu mengkhawatirkan di tengah upaya membangun konsolidasi demokrasi di Indonesia. Apalagi, adanya perbedaan kepentingan antara kubu merah putih dan Indonesia hebat, komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu memang membawa perubahan dalam konstalasi politik ditanah air. Tetapi bukan tidak mungkin situasi politik akan memanas kembali, hal ini terlihat dari persaingan partai politik kubu koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat untuk mengulirkan Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat ternyata masih belum

cukup optimal, khususnya untuk menciptakan keharmonisan antara lembaga, baik itu sesama anggota parlemen maupun parlemen dengan eksekutif.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya peran dan fungsi partai politik dalam alam demokrasi saat ini karena adanya intervensi dari elit-elit partai politik terhadap anggota parlemen maupun pemerintah dalam penentuan kebijakan ataupun pengambilan keputusan, misalnya dapat kita lihat dari kasus yang saat ini sedang terjadi.

Dengan munculnya kasus perpecahan partai Golkar menunjukkan bahwa anggota partai tidak punya kewenangan untuk berjalan berdasarkan aspirasi konstituennya. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bagaimana wajah anggota partai politik yang sebenarnya, baik itu yang duduk di legislatif maupun yang menduduki kursi di tataran Eksekutif.

Hubungan struktural partai politik yang masih bersifat sentralistis, adakalanya menyulitkan partai politik itu sendiri. Sehingga, kadangkala menimbulkan ketegangan antar pimpinan pusat partai politik dengan anggota partai politik. Masalah yang lebih serius akan terjadi apabila rekomendasi pimpinan pusat partai politik berbeda dengan aspirasi jajaran partai politik. Perbedaan kemauan dan persepsi seperti itu seringkali menyulut terjadinya konflik, bahkan bisa menyebabkan perpecahan internal. Yang mengkhawatirkan adalah jika kemudian konflik elit partai politik berubah menjadi konflik horizontal di tingkatan *grass root*. Yang akhirnya juga akan mengarahkan masyarakat pada jurang *chaos* dan anarkisme massa.

Selain itu, kurang pekanya partai politik terhadap setiap aspirasi masyarakat, juga menjadi parameter bahwa partai politik belum sepenuhnya

bekerja secara optimal. Pemaksaan keinginan elit partai, kadangkala bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Tidak heran jika pada tahap akhir banyak konstituen partai memilih meninggalkan sebuah partai disebabkan rasa tidak percaya mereka atas semua kinerja dan kebijakan partai politik.

Sedangkan dalam konteks peran media massa dalam kasus partai Golkar saat ini, yang perlu dicermati adalah agenda setting yang dijalankan oleh media massa sebagai kepentingan elit partai politik semata. Bahkan, pada satu titik elit partai politik menggunakan media untuk memobilisasi massa. Sebagaimana dikatakan oleh Jason dan Anne Hill (1997), media massa dalam teori Jarum Hipodermik mempunyai efek langsung “disuntikkan” ke dalam ketidak sadaran *audience*.⁴

Dengan fungsinya media dapat memilih peristiwa-peristiwa yang akan menjadi headlinenya dalam pemberitaan. Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya.⁵

Sementara itu berkaitan dengan koalisi partai politik, seperti yang telah sering kita dengar dalam perpolitikan di Indonesia ini, merupakan suatu gabungan beberapa partai politik. Koalisi partai ini sering terjadi ketika ada pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah atau pun pemilihan presiden. Koalisi partai bisa saja dilandasi oleh beberapa hal, misalnya kesamaan ideologi, kesamaan visi misi, kesamaan historis, atau kesamaan yang lainnya. Koalisi partai adalah hal yang wajar terjadi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem multipartai.

⁴Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman: 166.

⁵Nurudin. *ibid.* Halaman: 195.

Jelas di dalam multipartai untuk mendapat suatu kekuasaan yang maksimal maka harus menggabungkan kekuatan beberapa partai.

Kerjasama dan koalisi antarpol amat dibutuhkan untuk membangun dan melembagakan tradisi konsensus diantara para pemimpin partai. Koalisi juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan produktivitas demokrasi. Namun, hingga sekarang, apa syarat-syarat, prosedur dan mekanisme koalisi serta bagaimana isi “kesepakatan tertulis” antarpol, sama sekali tidak diatur dalam UU dan PP, kecuali PP No. 49 Tahun 2008 yang mengatur pencalonan oleh partai atau gabungan partai, antara lain hanya menyebut dua persyaratan penting, yakni pertama, kewajiban “menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung di daerah pemilihan”, dan kedua, “kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon”.

Karena itu banyak kalangan yang cukup sulit memprediksi arah dan kebijakan partai politik. Sebab, hal-hal seperti itu akan lebih ditentukan faktor kekuasaan jangka pendek dan konstelasi politik, seperti saham parpol yang tergabung dalam koalisi baik di dalam koalisi Merah Putih maupun koalisi Indonesia Hebat. Kondisi ini akhirnya juga akan menyulitkan sinkronisasi kebijakan dan konsolidasi antara pemerintah dan lembaga legislatif. Sebab, peta politik kekuasaan akan berbeda tergantung dari kepentingan partai itu sendiri.

Koalisi saat ini tentu menginginkan terciptanya suatu kesolitan yang kuat sehingga semua program-program yang direncanakan baik oleh kubu KMP maupun kubu KIH terlaksana dengan lancar. Tidak seperti kondisi saat ini perselisihan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih kini

terpampang secara jelas antar anggota parlemen dan parlemen dengan eksekutif. Di parlemen, perselisihan terus terjadi. Salah satunya yang terkait dengan perpecahan partai Golkar mengenai Hak angket yang akan digulirkan oleh kubu koalisi Merah Putih. Akibatnya konsentrasi anggota DPR tidak fokus untuk menjalankan tanggung jawabnya.

DPR hasil pemilu demokratis semakin gunjang ganjing. Lembaga Presiden terkena imbas dari permasalahan ini. Hubungan Presiden, Wakil Presiden dan para menteri tampak cukup solid dan terus berkonsolidasi. Namun serangan datang dari luar, baik pihak pers, LSM ataupun aneka tokoh berpengaruh. Yang diserang adalah para menteri yang bermasalah secara moral. Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla sudah telanjur populer dengan simbol perubahan dan tekad pemerintahan yang bersih. Harapan publik akibatnya sangat tinggi dengan pemerintahan baru. Semakin tinggi harapan akibatnya semakin mudah kecewa.

Beberapa menteri dianggap justru bertentangan dengan simbol perubahan dan sinyal pemerintahan yang bersih. Beberapa media secara terus-menerus memberitakan beberapa menteri yang berhubungan dengan kemampuan dan kapabilitas dari menteri di kabinet Kerja.

Kasus lain justru terjadi akibat hubungan yang kurang harmonis antara jajaran eksekutif dengan DPR. Hal ini dipicu oleh persoalan yang datang dari koalisi yang mendukung Presiden Jokowi. Isu yang muncul juga cukup sensitif mengenai penjegalan Presiden Jokowi jika Koalisi Merah Putih terus-terus di ganggu oleh KIH khususnya dari pihak istana, hal ini tersirat dalam perkataan salah satu politisi partai Golkar Bambang soesatyo yang juga anggota komisi III

DPR mengatakan akibat SK (Surat Keputusan) Menkumham memaksa Golkar harus melawan pemerintahan.⁶

Kondisi politik saat ini yang selalu diberitakan oleh media secara langsung akan menjadi preseden buruk dalam proses perwujudan demokrasi di republik ini, mengingat partai merupakan pilar penting dalam upaya pelembagaan politik yang demokratis. Jika partai dan elit politik masih belum mampu mengembangkan sikap dewasa dalam berpolitik, dengan saling memanfaatkan media sebagai bentuk strategi politiknya tentu stigma dan kesan buruk akan senantiasa di berikan kepada partai politik di Indonesia.

Sedangkan media dengan kepentingan teknis, idealisme dan pragmatismenya memilih mengemas dan mendistribusikan kepada khalayak kalau berita yang diangkat itu penting. Media itu sendiri tidak memiliki kekuasaan, namun institusi ini selalu berkaitan dengan kekuasaan negara dan pengusaha media karena adanya kesinambungan pemakaian media. Dalam konteks komunikasi politik media massa menjadikan dirinya sebagai médium pesan politik sehingga kenyataannya kekuasaan dan pengaruh secara terus-menerus diproduksi dan didistribusikan oleh media massa, karena dalam perkembangannya saat ini media massa banyak digunakan sebagai sarana penyampaian pesan yang sangat diminati.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui Persepsi Aktivistis Tentang Pemberitaan Perpecahan Partai Golkar di Televisi:

PERSEPSI AKTIVIS TENTANG PEMBERITAAN PERPECAHAN PARTAI GOLKAR DI TELEVISI (Studi Pada Pimpinan Harian Ikatan

⁶Okezone Mobile. Berita nasional, senin 23 Maret 2015 – 23.05

Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Bagaimana persepsi aktivis tentang pemberitaan perpecahan partai Golkar di Televisi?*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana persepsi aktivis tentang pemberitaan perpecahan partai Golkar di Televisi.

D. Manfaat Penelitian

D.1 Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap studi tentang Persepsi aktivis tentang berita politik di media massa, dan kajian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian di bidang Ilmu Komunikasi.

D.2 Praktis

Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan berguna bagi Mahasiswa, masyarakat umum, politisi dan praktisi mengenai persepsi aktivis tentang media massa khususnya televisi.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah menjelaskan konsep dengan kata-kata atau istilah lain yang berkaitan dengan judul dan pembahasan utama dari penelitian ini.

Untuk dapat lebih memperjelas dalam penelitian ini maka penulis mendefinisikan judul secara konsep sebagai berikut:

a. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

b. Berita

Berita adalah suatu informasi yang baru (*new*) yang mengandung makna penting (*significant*) yang ada pengaruhnya terhadap siapa pun yang mendengarnya, dan menarik bagi sipendengar. Berita adalah proses (pembuatan berita) menegosiasikan laporan yang bermakna tentang kejadian. Berita mencakup simbolisasi (1) kejadian sebagai peristiwa – “tindakan tegas” yang mengisyaratkan keadaan dengan segala kerumitannya yang bersimpang-siur; (2) peristiwa sebagai bernilai berita melalui berita dan kisah berita – “buletin stereotip yang menerbitkan isyarat”; dan (3) peristiwa yang bernilai berita sebagai bermakna bagi orang untuk membuat penyesuaian dalam kehidupannya – “makna yang dikemukakan sendiri oleh pembaca setelah ia menurunkan makna itu dari pengalaman yang secara langsung mempengaruhinya.”⁷

c. Partai Golkar

Akibat perkembangan kehidupan sosial politik di Indonesia, masyarakat karya dan kekaryaannya belum sempat menghimpun dan mengorganisir diri dalam satu wadah yang merupakan sarana untuk mengabdikan karya dan

⁷Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik (Komunikator, pesan dan Media)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman: 217

kekaryaannya guna pembangunan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu tanggal 20 Oktober 1964 masyarakat karya dan kekaryaannya menghimpun diri dalam wadah organisasi politik yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya.

Selanjutnya dalam rangka mengemban hakikat tatanan baru tersebut maka masyarakat karya dan kekaryaannya yang berhimpun dalam organisasi Sekretariat Bersama Golongan Karya memantapkan diri dalam wadah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Golongan Karya.

Bersamaan dengan itu cita-cita reformasi juga menghendaki penataan kembali fungsi-fungsi institusi negara maupun masyarakat agar dapat melaksanakan perannya secara optimal, dengan menempatkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Kondisi sosial politik tersebut telah mengakibatkan perubahan mendasar terhadap sistem politik dan kepartaian di Indonesia.

Dilandasi oleh semangat reformasi tersebut, Golongan Karya melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik pada Rapat Pimpinan Paripurna Golongan Karya tanggal 19 Oktober 1998 dan di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999, dengan nama Partai Golongan Karya.

d. Televisi

Menurut Krisna Murti, televisi merupakan salah satu media baru yang mengubah cara kita melihat realitas dan perilaku (Murti, 2006, 18).

Sementara itu Robert E Denton, Jr dalam buku yang berjudul, *Political Communication Ethics*, "Televisi ditakdirkan untuk menyatukan kita,

mendidik kita, dan sebagai akibatnya, memperbaiki tindakan-tindakan dan keputusan kita.” “Sebagai sumber informasi publik,” lanjutnya, “televisi menyediakan *potensi* paling besar untuk memahami diri kita sendiri, masyarakat kita, dan bahkan dunia.⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, maka batasan konseptual dalam penelitian ini adalah mengkaji persepsi aktivis tentang pemberitaan perpecahan partai Golkar di Televisi.

F. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini terletak pada persepsi aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tentang Pemberitaan Perpecahan partai Golkar di Televisi dalam hal penyiaran berita konflik partai golkar.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur berupa cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Untuk itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif.

Peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupaya untuk mengungkapkan persepsi aktivis, berkaitan dengan adanya pemberitaan perpecahan partai Golkar di Televisi. Metode penelitian kualitatif dirasakan lebih cocok dan relevan dengan topik atau pembahasan yang akan diteliti karena menggali dan memahami persepsi yang terbentuk di kalangan aktivis tentang pemberitaan perpecahan partai Golkar di Televisi.

⁸ Ristyantoro, R. 2011. *Etika Komunikasi politik*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Halaman: 3-4

G.1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk instrumen pengumpulan data, agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten dengan metode penelitian yang dipilih dan objek yang menjadi unit analisis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dalam riset kualitatif disebut sebagai wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara secara intensif dan kebanyakan takberstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam.⁹

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai Pimpinan Harian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti melakukan wawancara dengan cara langsung dengan tatap muka kepada informan, tujuannya adalah mendapatkan data persepsi aktivis tentang pemberitaan perpecahan partai Golkar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan

⁹ Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman: 96.

penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.¹⁰

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data dan informasi melalui data-data dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan persepsi aktivis tentang pemberitaan perpecahan partai Golkar di Televisi. Data dokumentasi yang dimaksud diletakkan dalam dua instrumen penting, yakni: *pertama*, data dokumentasi yang merupakan data hasil kutipan dari berbagai data yang didapat berkaitan dengan aktivis tentang pemberitaan perpecahan partai Golkar di Televisi yang penulis peroleh melalui dokumen Aktivis IMM, dan dokumen lain yang menunjang. *Kedua*, adalah data dokumentasi yang merupakan penjabaran dari penulis setelah melihat data dokumentasi dan komunikasi langsung.

G. 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang berada di Tirta Utomo Gg 10, Desa Landungsari Malang.

G.3. Populasi dan Sampel

Populasi (kumpulan objek riset) bisa berupa orang, organisasi, kata-kata, dan kalimat, simbol-simbol nonverbal, surat kabar, radio, televisi, iklan, dan lainnya. Objek riset ini juga disebut satuan analisis (*unit of analysis*), atau unsur-unsur populasi. Sedangkan sampel adalah sebagian

¹⁰ Kriyantono, Rachmat. *ibid.* Halaman: 116.

dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati.¹¹ Dari sini subjek akan dipilih sesuai dengan keperluan karena yang digali dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi bukan kuantitas. Untuk mendapatkan informasi dan data peneliti menggunakan *Purposive Sampling* (sample bertujuan), dimana sample sudah sengaja ditentukan oleh peneliti. Yaitu

- Pimpinan Harian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang pernah menonton berita perpecahan partai Golkar di Televisi.

G.4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh periset melalui perangkat metodologi tertentu.¹² Dengan analisa data peneliti berarti melakukan suatu proses pengolahan data, penyederhanaan, Pembahasan serta menerjemahkan data atau hasil penemuan ke dalam kata-kata yang lebih rapi dan teratur sehingga mudah dipahami.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan data dan menginterpretasikan data yang didapat dari wawancara dan juga data dokumentasi yang didapat.¹³ Data yang didapat selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan diskripsi yang berisi narasi

¹¹Kriyantono, Rachmat. *ibid.* Halaman: 149.

¹²Kriyantono, Rachmat. *ibid.* Halaman: 83.

¹³Pitoyo, Joko. 2008. *Perilaku Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Skripsi tidak Diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman: 31

kualitatif, dengan tujuan mendiskripsikan tentang persepsi aktivis tentang pemberitaan perpecahan partai Golkar di Televisi.

Sedangkan urutan dalam analisa ini adalah:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan benar atau salah, apabila ternyata ada yang kurang maka peneliti akan berusaha melengkapinya.

2. Mengolah Data

Pengolahan dapat dilakukan dengan memilah-milah data hasil wawancara sesuai dengan data pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Kemudian selanjutnya data dijelaskan dalam bentuk penyajian data.

3. Analisa dan Interpretasi Data

Analisa terhadap data yang telah dipilah-pilah tersebut dan selanjutnya diinterpretasikan oleh peneliti. Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan prinsip-prinsip penelitian kualitatif, dimana akan dijelaskan melalui paparan-paparan atau gambaran-gambaran yang relatif menyeluruh.

G.5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi yaitu menganalisa jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia.

Triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber. Dimana dalam metode pemeriksanaan keabsahan data ini dengan membandingkan

atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.¹⁴



¹⁴Kriyantono, Rachmat. Op.Cit. Halaman: 71.